

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS PENDAPAT DPR TERHADAP USUL
PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN**

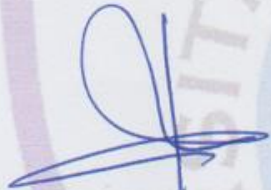
Oleh:

ANDHIKA TRIANSYAH LATJUBA

NIM: 271414182

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I



LISNAWATY W. BADU, SH., MH

Nip. 196905292005012001

PEMBIMBING II




DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH

Nip. 198508272009121005

Mengetahui

KETUA JURUSAN ILMU HUKUM



NOVENDRI M. NGGILU, S.H., M.H

Nip: 198911272014041001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS PENDAPAT DPR TERHADAP USUL
PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN**

Oleh:

ANDHIKA TRIANSYAH LATJUBA

NIM 271414182

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal: JUMAT, 05 FEBRUARI 2021

Pukul: 13:00-15:00 WITA

Komisi Penguji:

1. **Mutia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum** (.....)
Nip. 196907041998022001
2. **Julius T. Mandjo, SH., MH** (.....)
Nip. 198907022019031015
3. **Lisnawaty W. Badu, SH., MH** (.....)
Nip. 196905292005012001
4. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** (.....)
Nip. 198508272009121005

Gorontalo, 05 Februari 2021

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Prof. DR. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 196804091993032001

ABSTRAK

Andhika Triansyah Latjuba, 271414182. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pendapat DPR terhadap Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. **Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH.** Selaku Pembimbing 1 dan **Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** Selaku Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penulisan Skripsi 2021.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendapat DPR tidak seperti putusan menyangkut empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945 yang bersifat *final and binding*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi serta konstruksi hukum proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah pada tahap memutuskan pendapat DPR. Sehingga putusan tersebut bersifat mengikat bagi DPR. Putusan itu selanjutnya akan menjadi penentu bagi DPR untuk melanjutkan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Adanya ketentuan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bisa diadili secara hukum pidana atau perdata biasa selama masa jabatannya adalah alasan untuk melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia menggunakan metode campuran antara *impeachment* (sidang legislatif) dan forum *previlegiatum* (peradilan khusus).

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah putusan secara hukum yang haruslah menjadi pertimbangan utama bagi MPR dalam sidang paripurna pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kata Kunci: *putusan, Mahkamah Konstitusi, Presiden, Wakil Presiden, impeachment, forum previlegiatum.*

ABSTRACT

Andhika Triansyah Latjuba, 271414182. Juridical Review on Constitutional Court Authority in Inferring Perspective of House of Representatives (DPR) on the President and Vice President Removal Proposal. The principal supervisor is **Lisnawaty Badu W. Badu, SH., MH.** and the co-supervisor is **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH.** Faculty of Law, State University of Gorontalo. Undergraduate Thesis. 2021.

Constitutional Court is one of the judicial institutions acting as judiciary power executor and has four authorities and one responsibility. The responsibility is inferring perspective of House of Representatives related to president and vice president removal proposal. The ruling of Constitutional Court on the previous case is not as final and binding as the one related to four authorities of the court that is managed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The research aims to respond to the standing of Constitutional Court's ruling and legal construction on the process of removing the president and vice president from office. The research employs normative legal research, a literature study that applies statute approach. The sources of legal material include primary, secondary, and tertiary legal sources. The research finding discovers that the role of Constitutional Court is inferring the perspective of House of Representatives in removing the president and vice president in which the ruling is binding. Subsequently, the ruling is the reference for the House of Representatives in continuing the removal proposal to the People's Consultative Assembly (MPR). The emergence of provision that is related to case that the president and vice president cannot be tried in either criminal and civil law is merely an excuse to involve Constitutional Court. Therefore, the removal of the president and vice president from office in Indonesia applies mixed method includes impeachment (legislative trial) and *privilegium forum* (special court).

The ruling of Constitutional Court on the perspective of House of Representatives on the president and vice president removal proposal is a legal ruling that should be a prime judgment of MPR in the Plenary Session on the removal case.

Keywords: Ruling, Constitutional Court, President, Vice President, Impeachment, Privilegium Forum